

Analisis Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Terhadap Kepercayaan Publik

Azzahra Intan Nuraini W¹, Maria Agustina Aso², Andine Sekar Kinanti³, Siti Aisyah⁴, Yoseph Vitaliano Demelo Enriko⁵

¹⁻⁵Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta Pusat, Indonesia

Alamat: Jl. Salemba Tengah No.22, RT.1/RW.4, Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Korespondensi penulis: azzahraintannuraini@gmail.com

Abstrak; *This study aims to examine the financial statements of PT PLN (Persero) related to the level of public trust. By applying a quantitative descriptive method utilizing secondary data sourced from financial statements from 2021 to 2023, this study focuses on the liquidity ratio which includes the current ratio and cash ratio. The results of the analysis show a significant increase in both ratios, which reflects PT PLN's ability to pay off its short-term obligations. This increase has a positive impact on public trust, both from the consumer and investor side, because it shows the stability of the company's financial condition and professionalism in managing its operations. With improved liquidity conditions, PLN is considered more reliable in providing electricity services and attractive to external parties.*

Keywords: *PT PLN (Persero), financial statements, liquidity ratios, public trust*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji laporan keuangan PT PLN (Persero) yang berkaitan pada tingkat kepercayaan publik. Dengan menerapkan metode kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahun 2021 sampai 2023, penelitian ini memfokuskan pada rasio likuiditas yang mencakup rasio lancar (current ratio) dan rasio kas (cash ratio). Hasil dari analisis menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kedua rasio tersebut, yang mencerminkan kapasitas PT PLN dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Peningkatan ini memberikan dampak positif terhadap kepercayaan publik, baik dari sisi konsumen maupun investor, karena menunjukkan kestabilan kondisi keuangan dan profesionalisme perusahaan dalam pengelolaan operasionalnya. Dengan kondisi likuiditas yang membaik, PLN dinilai lebih andal dalam memberikan pelayanan listrik dan menarik bagi pihak eksternal.

Kata kunci: PT PLN (Persero); Laporan Keuangan; Rasio Likuiditas; Kepercayaan Publik.

1. LATAR BELAKANG

Seiring berkembangnya industri gula dan listrik di Indonesia pada abad ke – 19, terdapat beberapa perusahaan milik Belanda yang mendirikan pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan mereka pada pabrik gula dan teh. Di awal Perang Dunia II, Belanda menyerah pada Jepang dan pengelolaan perusahaan Belanda tersebut diambil alih oleh Jepang. Kekuasaan beralih kembali setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar perusahaan – perusahaan itu diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia.

Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membuat keputusan strategis dengan mendirikan Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk mengelola fasilitas pembangkit listrik yang saat itu memiliki kapasitas total 157,5 MW. Kemudian mulai 1 Januari 1961, Jawatan

Listrik dan Gas mengalami perubahan menjadi BPU/PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sektor listrik dan gas. Di saat yang sama, dua perusahaan negara diresmikan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk listrik dan Perusahaan Gas Milik Negara (PGN) untuk gas. Seiring waktu, perusahaan ini terus berubah bentuk hingga akhirnya pada 1994 melalui Peraturan Pemerintah No. 23/1994 menjadi perusahaan perseroan (Persero). Dengan demikian, PT Perusahaan Listrik Negara yang dikenal sebagai PT PLN (Persero) resmi didirikan berdasarkan Akta No. 169 yang ditandatangani oleh notaris Sutjipto pada tanggal 30 Juni 1994. PT PLN (Persero) telah berhasil tumbuh dan berkembang menjadi salah satu perusahaan dengan kepemilikan aset terbesar di Indonesia selama 75 tahun perjalanannya (Subitmele, 2022).

Di era globalisasi, kemajuan teknologi informasi cepat memberikan kenyamanan kepada manusia dalam menjalankan kegiatan sehari – hari. Dalam memberikan kenyamanan tersebut, dibutuhkan pasokan energi listrik yang memadai dan dapat diandalkan (Arman et al., 2024). Di kehidupan sehari – hari, manusia memerlukan energi listrik untuk menunjang setiap kegiatannya. Di Indonesia, seluruh pengelolaan listrik dilakukan oleh perusahaan milik negara yaitu PLN (Perusahaan Listrik Negara). Energi listrik yang dikelola oleh PLN tersebut, berasal dari berbagai jenis pembangkit yaitu pembangkit yang menggunakan sumber energi terbarukan seperti PLTA, serta pembangkit yang memanfaatkan sumber energi tidak terbarukan seperti PLTU dan PLTD. Saat ini , sekitar 60% pasokan listrik di Indonesia masih bergantung pada pembangkit berbahan bakar minyak, dimana untuk menghasilkan 1 kWh listrik dibutuhkan kurang lebih 1 liter solar (Ridlo Al Hakim et al., 2021).

Pada awalnya, pembangunan infrastruktur di Indonesia lebih terfokus pada wilayah perkotaan dan pusat – pusat industri. Hal ini mengakibatkan penyebaran listrik yang sangat terbatas dan menciptakan ketimpangan akses yang signifikan terutama masyarakat di daerah terpencil. Namun, seiring dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemerataan pembangunan dan akses energi bagi seluruh warga negara. Upaya untuk memperluas jaringan listrik telah berhasil mencakup banyak wilayah, termasuk desa – desa yang jauh dari pusat. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan terkait infrastruktur dan biaya yang perlu diatasi.

Tantangan utama dalam pengembangan infrastruktur, khususnya di sektor kelistrikan, terletak pada kondisi geografis yang ada. Faktor ini menjadi penentu utama yang membawa beragam tantangan kompleks dan saling berkaitan dalam usaha pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur listrik oleh PLN di daerah – daerah terpencil di Indonesia. Variasi topografi, mulai dari pegunungan terjal, hutan lebat, hingga wilayah rawa, secara signifikan menyulitkan proses konstruksi jaringan listrik dan meningkatkan biaya yang diperlukan. Pengembangan jalan akses yang memadai untuk pengangkutan material serta peralatan berat menjadi salah satu kendala utama. Selain itu, proses instalasi di setiap gardu di daerah yang sulit dijangkau memerlukan teknik khusus dan waktu yang lebih lama untuk penyelesaiannya.

Karakteristik geografis daerah terpencil sering kali ditandai dengan jarak yang jauh antar permukiman dan aksesibilitas yang terbatas, seperti jalan yang rusak, sungai, atau jalur setapak. Kondisi ini memperpanjang kebutuhan jaringan listrik secara keseluruhan, berdampak pada biaya investasi untuk material seperti kabel, tiang, dan trafo, serta biaya operasional untuk pemeliharaan. Selain itu, keterbatasan logistik dalam pengiriman material dan tenaga kerja ke lokasi-lokasi terpencil, yang sering kali diperburuk oleh cuaca ekstrem, menambah kompleksitas dan meningkatkan potensi keterlambatan proyek. Untuk berhasil dalam memperluas jangkauan listrik ke daerah-daerah terpencil, PLN harus mampu mengatasi tantangan geografis yang spesifik ini dengan solusi teknis yang adaptif, kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan, serta koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait. Mengabaikan kompleksitas kondisi geografis ini dapat menghambat upaya elektrifikasi dan mengakibatkan keterlambatan dalam mewujudkan akses listrik yang adil dan merata di seluruh Indonesia.

Sebagai sebuah perusahaan terutama Perusahaan Milik Negara harus bisa meningkatkan kepercayaan publik, karena semakin tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut maka akan lebih banyak lagi investor dan kalangan luar lainnya yang akan memakai jasa dari perusahaan.

Secara umum, kepercayaan publik dapat diartikan sebagai sikap abstrak yang mencerminkan adanya hubungan saling pengertian dan saling percaya antara satu pihak dengan pihak lainnya (Putra, 2017). Selain itu, kepercayaan pelanggan dapat diartikan sebagai respon pelanggan dalam mengevaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara

harapan dan performa aktual produk saat digunakan. Oleh karena itu, guna meminimalkan ketidakpastian dan menghindari kesalahpahaman antara perusahaan dan pelanggan PT PLN perlu menjalin serta mempertahankan kepercayaan dari konsumennya (Nurjanah & Tuswoyo, 2022)

2. LANDASAN TEORI

2.1. Laporan Keuangan sebagai Alat Transparansi dan Akuntabilitas

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemangku kepentingan atas kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu (Hery, 2021). Dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT PLN (Persero), laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknis, tetapi juga sebagai simbol transparansi dan akuntabilitas kepada publik, termasuk pemerintah, masyarakat, dan investor.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan keuangan harus memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh para penggunanya. Oleh karena itu, kualitas penyajian laporan keuangan sangat berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap integritas dan profesionalisme manajemen perusahaan (Scott, 2015).

2.2. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pihak prinsipal (pemilik, dalam hal ini publik dan pemerintah) dan agen (manajemen perusahaan). Dalam konteks PT PLN, publik sebagai prinsipal mengharapkan manajemen untuk mengelola perusahaan secara efisien dan bertanggung jawab. Namun, karena adanya keterpisahan kepemilikan dan pengelolaan, potensi konflik kepentingan (*agency conflict*) muncul.

Laporan keuangan berfungsi sebagai salah satu mekanisme pengendalian dalam teori agensi untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan antara pihak prinsipal dan agen (Jensen & Meckling, 1976). Ketika laporan keuangan disusun secara transparan dan sesuai standar, maka hal tersebut akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan PT PLN.

2.3. Kepercayaan Publik (*Public Trust*) dalam Perspektif Manajemen

Kepercayaan publik adalah persepsi masyarakat terhadap integritas, kompetensi, dan transparansi sebuah institusi dalam memenuhi harapan publik. Dalam perspektif manajemen strategis, kepercayaan publik merupakan aset tak berwujud yang memiliki nilai tinggi dan berpengaruh langsung terhadap legitimasi sosial suatu perusahaan, khususnya perusahaan milik negara (Mayer, Davis & Schoorman, 1995).

Faktor-faktor pembentuk kepercayaan publik meliputi:

Transparansi informasi

Konsistensi kinerja keuangan

Komunikasi publik yang efektif

Ketepatan dalam memenuhi janji layanan

Laporan keuangan yang disusun secara baik, diaudit oleh pihak independen, dan disampaikan secara terbuka kepada publik merupakan bentuk nyata dari komitmen perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, kualitas laporan keuangan menjadi indikator utama yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik.

2.4. *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran menjadi kerangka penting dalam pengelolaan perusahaan publik. Dalam teori tata kelola perusahaan, laporan keuangan merupakan alat utama untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. PT PLN sebagai BUMN wajib menerapkan prinsip GCG dalam seluruh aktivitas operasional dan pelaporan keuangannya. GCG yang dijalankan dengan baik akan meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata publik dan investor, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepercayaan publik (OECD, 2015).

2.5. Keterkaitan Laporan Keuangan dan Kepercayaan Publik

Dalam kerangka hubungan kausal, laporan keuangan yang transparan dan kredibel akan:

- a. Meningkatkan persepsi positif terhadap integritas perusahaan.
- b. Menurunkan tingkat skeptisisme publik terhadap pengelolaan keuangan.
- c. Meningkatkan legitimasi sosial perusahaan.
- d. Memperkuat hubungan antara perusahaan dan pemangku kepentingan.

Dengan demikian, analisis laporan keuangan bukan hanya menyangkut evaluasi angka-angka finansial, tetapi juga merupakan pendekatan strategis untuk mengukur dan membangun kepercayaan publik terhadap PT PLN sebagai penyedia layanan publik vital.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif menjadi dasar utama dalam penelitian ini, yang berarti fokus utama kami adalah pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk angka. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang diambil dari data statistik atau matematika. Tujuannya adalah untuk menguji teori, mengukur hubungan antara variabel, dan menarik kesimpulan yang dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Dalam penelitian ini, fenomena yang akan diteliti dan didekati melalui pengukuran yang objektif dan analisis statistik. Data yang dikumpulkan umumnya berupa angka-angka, yang selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan berbagai teknik statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.

Sasaran utama dari penelitian kuantitatif adalah untuk memberikan penjelasan, membuat prediksi, atau mengontrol suatu fenomena dengan menggunakan data empiris yang dapat diukur secara objektif. Dalam studi ini menggunakan data sekunder yaitu informasi yang didapatkan secara tidak langsung seperti melalui internet, dokumen, jurnal dan berbagai artikel lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan rasio likuiditas keuangan PT PLN selama tiga tahun berturut – turut yaitu pada tahun 2021, 2022 dan 2023.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Kasmir (2018:04), Rasio keuangan yaitu salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui dan memahami laporan keuangan yang dilakukan dengan cara mempertimbangkan antara nilai satu dengan nilai lainnya baik yang sejenis maupun yang berada di bagian laporan keuangan yang berbeda, yang memerlukan analisis spesifik. Kesesuaian ini dapat diwujudkan dengan bagian-bagian yang ada di dalam laporan keuangan. Di dalam Rasio Keuangan secara garis besar dapat dibedakan menjadi lima jenis Rasio.

Menurut Hery (2021), rasio likuiditas yaitu sebuah rasio yang memprediksi seberapa kekuatan dan keahlian Perusahaan di dalam mencukupi suatu tanggung jawab dalam waktu yang singkat yang harus segera di laksanakan. Rasio likuiditas umumnya terbagi menjadi rasio lancar dan rasio kas.

4.1. Rasio Lancar

Rasio lancar adalah ukuran likuiditas keuangan yang menilai kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu singkat. Rasio ini didapat dari hasil pembagian aset lancar perusahaan dengan kewajiban lancarnya. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}}$$

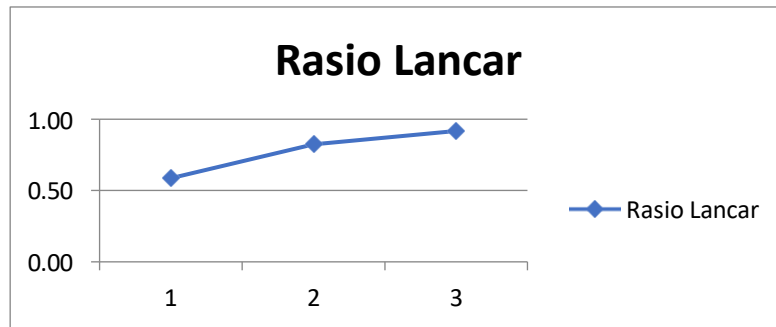
Berikut adalah tabel yang merangkum nilai aset lancar, utang lancar, dan rasio lancar PT PLN dari tahun 2021 sampai 2023. Informasi ini memberikan gambaran tentang kesehatan finansial jangka pendek perusahaan.

Perhitungan Rasio Lancar PT PLN2021 – 2023

Tahun	Aset Lancar	Utang Lancar	Rasio Lancar
2021	Rp 85.911.375	Rp 146.538.480	0,59
2022	Rp 119.391.382	Rp 145.071.451	0,82
2023	Rp 131.383.486	Rp 143.195.433	0,92

Dalam grafik dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan pada Rasio Lancar di PT PLN pada tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Grafik Trend Rasio Lancar PT PLN Tahun 2021 – 2023



Berdasarkan grafik di atas, menunjukkan bahwa PT PLN mengalami peningkatan yang signifikan. Dimulai dari tahun 2021 ke 2022 meningkat sebesar 24% (0,23). Lalu dari 2022 ke 2023 naik lagi sebesar 9% (0,9). Peningkatan rasio lancar biasanya dinilai baik, tetapi rasio yang sangat meningkat bisa memperlihatkan dalam penggunaan aset lancarnya. Namun, dalam hal PT PLN yang merupakan perusahaan besar dengan kebutuhan modal kerja yang besar, peningkatan rasio lancar biasanya dianggap sebagai pertanda baik terkait pengelolaan keuangan jangka pendeknya.

4.2. Rasio Kas

Rasio kas yaitu salah satu cara rasio keuangan dengan menghitung kesanggupan pada perusahaan atau suatu organisasi dalam menjalankan kewajiban keuangan mereka dengan memanfaatkan dana yang ada. Rasio ini menghitung kemampuan perusahaan untuk menjalankan kewajiban dalam waktu singkat hanya dengan asset paling likuid yang dimilikinya sekarang.

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Setara Kas}}{\text{Hutang Lancar}}$$

Tabel dibawah ini menampilkan kas rasio pada PT PLN yang terjadi pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2021-2023.

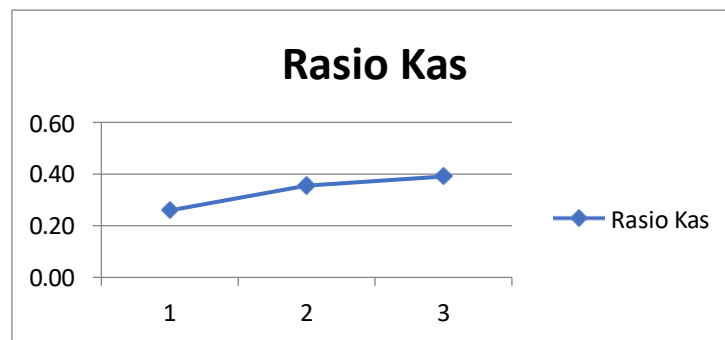
Perhitungan Rasio Kas PT PLN 2021 – 2023

Tahun	Kas dan Setara Kas	Utang Lancar	Rasio Kas
2021	Rp 37.968.399	Rp 146.538.480	0,26

2022	Rp	51.503.096	Rp 145.071.451	0,36
2023	Rp	55.920.541	Rp 143.195.433	0,39

Grafik dan tabel menunjukkan rasio kas PT PLN terus meningkat signifikan selama tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2023. Peningkatan ini menandakan kondisi keuangan perusahaan yang baik dan stabil. Dari grafik yang ada, terlihat bahwa rasio kas PT PLN terus naik dari tahun 2021 sampai 2023. Tren ini sama dengan yang terjadi pada rasio lancar perusahaan.

Grafik Trend Rasio Kas PT PLN 2021 - 2023



Jika dilihat dari Grafik Trend Rasio Lancar dan Rasio Kas dapat disimpulkan bahwa kedua grafik tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam likuiditas keuangan PT PLN (Persero) selama periode 2021 hingga 2023, yang menunjukkan kemampuan PT PLN (Persero) yang semakin baik saat menjalankan tanggung jawab dalam waktu singkat.

Berdasarkan analisis rasio lancar dan rasio kas dalam laporan keuangan PT PLN (Persero) pada periode 2021–2023, tampak adanya peningkatan signifikan dalam kesanggupan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio yang berjalan lancar naik sebelumnya 0,59 pada periode 2021 dan kemudian naik 0,92 pada periode 2023, sedangkan rasio kas bertambah dari 0,26 menjadi 0,39 pada periode yang sama. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan kondisi likuiditas PLN, yang berarti perusahaan memiliki cukup aset lancar dan kas untuk membayar utang jangka pendek. Hal ini berimplikasi besar bagi kepercayaan masyarakat, karena menunjukkan bahwa PLN berada dalam keadaan keuangan

yang lebih stabil dan lebih mampu mengelola kewajiban operasionalnya. Bagi masyarakat, situasi keuangan yang baik ini menimbulkan keyakinan bahwa layanan listrik tidak akan terhambat akibat masalah keuangan perusahaan. Sementara itu, bagi investor dan kreditor, perbaikan rasio likuiditas ini mengurangi risiko gagal bayar, sehingga membuat PLN lebih menarik sebagai pilihan untuk investasi. Tingkat transparansi dan perbaikan dalam laporan keuangan semacam ini juga memperkuat citra perusahaan sebagai penyedia layanan publik yang profesional, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan, yang pada gilirannya membangun hubungan jangka panjang yang lebih kokoh antara perusahaan dan masyarakat.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Jurnal ini berfokus kepada pemerataan penyebaran listrik di seluruh Indonesia. Di mana masih banyak kesenjangan mengenai akses listrik antara di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan. Masih banyak di daerah pedalaman yang kesulitan untuk mendapatkan listrik karena berbagai kendala yang ada. Oleh sebab itu, penting bagi Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, untuk mengetahui perkembangan dari PT PLN (Persero) selaku BUMN yang bertugas untuk menyediakan jasa listrik di Indonesia, maka dapat dilihat dari kinerja laporan keuangan PT PLN tersebut dari perhitungan rasio keuangan Likuiditas pada periode 2021 – 2023.

Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, dapat dinyatakan bahwa PT PLN (Persero) telah menunjukkan kinerja keuangan yang stabil dan cenderung meningkat selama rentang waktu 2021 hingga 2023. Hal ini terlihat dari meningkatnya grafik rasio lancar dan rasio kas, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Peningkatan tersebut juga menunjukkan adanya perbaikan dalam likuiditas keuangan perusahaan. Berdasarkan kestabilan grafik tersebut, maka kepercayaan publik terhadap PT PLN (Persero) akan semakin meningkat.

SARAN

Meskipun PT PLN (Persero) telah menunjukkan hasil laporan keuangan yang baik, perusahaan harus mempertahankan dan lebih meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset dan kewajibannya. Selain itu, Perusahaan juga harus terus beradaptasi dan harus bisa mengatasi kendala – kendala yang ada, seperti kendala pada geografis dalam pemerataan akses listrik yang adil di seluruh wilayah Indonesia terutama di daerah pedalaman yang fasilitasnya sangat terbatas. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap PT PLN (Persero).

DAFTAR REFERENSI

- Arman, Rijanto, T., Joko, & Harimurti, R. (2024). Analisis Penempatan Recloser Terhadap Keandalan Sistem Tenaga Listrik Jaringan Distribusi 20kV di PT.PLN (Persero) ULP AMUNTAI. *Jurnal Teknik Elektro*, 13(2), 130–134.
- Nurjanah, S., & Tuswoyo. (2022). ANALISIS IMPELEMENTASI PELAYANAN PENGGUNAAN APLIKASI TERPADU (APKT) UNTUK KEPERCAYAAN Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI , Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(5), 526–532.
- Putra, M. A. R. (2017). Peningkatan Kepercayaan Publik Melalui Pemerintahan Partisipatif. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 1–9.
- Ridlo Al Hakim, R., Ropiudin, Muchsin, A., & Satya Lestari, F. (2021). Analisis Kenaikan Tagihan Listrik Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perilaku Konsumtif Energi Listrik Di Indonesia. *Jurnal Cafeteria*, 2(1), 25–35. <https://doi.org/10.51742/akuntansi.v2i1.279>
- Subitmele, S. E. (2022). *PT PLN Persero adalah Usaha Milik Negara, Ketahui Sejarah, Prestasi dan Anak Perusahaannya*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5140214/pt-pln-persero-adalah-usaha-milik-negara-ketahui-sejarah-prestasi-dan-anak-perusahaannya?page=5>